

GEREJA DAN POLITIK
STUDI KASUS: PERSEPSI JEMAAT GMIM TERHADAP PENDETA
YANG TERJUN DALAM DUNIA POLITIK PRAKTIS

Oleh

Indria Pricillia Tumbelaka

Nim: 71 2009 049

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Progam Studi Teologi, Fakultas Teologi
guna memenuhi sebagian dari persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sains
Teologi (S.Si Teol)



Program Studi Teologi

FAKULTAS TEOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2014



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indria Pricillia Tumbelaka

NIM : 71 2009 049

Email : pricillia_indria@yahoo.com

Fakultas : TEOLOGI

Program Studi : TEOLOGI

Judul tugas akhir : GEREJA dan POLITIK

(Studi Kasus: Persepsi Jemaat GMIM Terhadap Pendeta Yang Terjun Dalam Dunia Politik Praktis)

Yang dibimbing oleh :

1. Pdt. Dr. Daniel Nuhamara MT.h, ED.d

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 22 September 2014



Indria Pricillia Tumbelaka



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga 50711
Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0298 – 321212, Fax. 0298 321433
Email: library@adm.uksw.edu ; http://library.uksw.edu

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indria Pricillia Tumbelaka
NIM : 71 2009 049 Email : pricillia_indria@yahoo.com
Fakultas : TEOLOGI Program Studi : TEOLOGI
Judul tugas akhir :

GEREJA DAN POLITIK

(Studi Kasus: Persepsi Jemaat GMIM Terhadap Pendeta Yang Terjun Dalam Dunia Politik Praktis)

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbataskannya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 22 September 2014

Indria P Tumbelaka

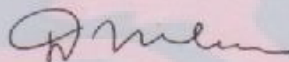
Mengetahui,

Pdt. Dr. Daniel Nuhamara MT.h, ED.d
Tanda tangan & nama terang pembimbing I

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Program Studi: Teologi, Fakultas: Teologi
guna memenuhi sebagian dari persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sains Teologi
(S. Si Teol)

Disetujui oleh,
Pembimbing

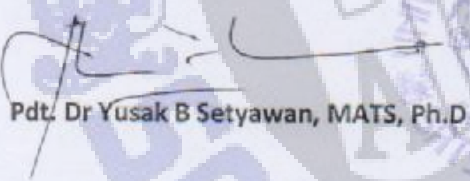


Pdt. Dr Daniel Nuhamara, MT.h Ed.D

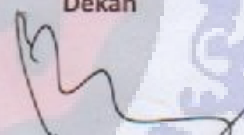
Diketahui oleh,

Kepala Program Studi

Dekan



Pdt. Dr Yusak B Setyawan, MATS, Ph.D



Pdt. Dr Retnowati, MSi

FAKULTAS TEOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2014

MOTTO

"WHEN THERE'S A WILL THERE'S A WAY"

Impossible is not a word. It's just a
reason for someone not to try

"What Faith Can Do" -Kutless -

Yesaya 41 : 10

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananKu yang membawa kemenangan...

Mazmur 40 : 6

Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanMu yang ajaib dan maksudMu untuk kami. Tidak dapat disejajarkan dengan Engkau! Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung.

Karya ini ku persembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus.

Papi dan Mami yang selalu menyebut namaku dalam setiap doa.

Almamater tercinta, UKSW!

UCAPAN TERIMA KASIH

Amazing Grace....!!

Hanya karena Anugerah dan tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus, penulis yakni Indria Pricillia Tumbelaka selaku mahasiswa Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) boleh menyelesaikan tugas akhir dan mendapatkan gelar Sarjana Sains Teologi (S.Si Teol). merupakan proses pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis karena bukan hanya hasil akhir dari karya tulis ini yang menjadikan penulis merasa bersyukur akan tetapi proses jatuh bangun selama menulis, memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.

Melewati segala proses tersebut, penulis merasa tidak berjalan sendiri karena adanya orang-orang luar biasa yang selalu ada bersama penulis. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi serta bimbingan baik selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini, maupun selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Kristen Satya Wacana.

1. Pdt. Dr Daniel Nuhamara MT,h Ed.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis tanpa kenal lelah. Di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang pelayan Tuhan maupun pengajar tetapi selalu bisa memperhatikan tugas akhir penulis. Terima kasih untuk arahan, motivasi, nasihat yang selalu diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tuhan memberkati Pak Dani dalam setiap tugas dan tanggung jawab baik dalam keluarga maupun di Fakultas Teologi UKSW.
2. Seluruh Dosen Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, yang telah memberikan didikan dan ilmu kepada penulis selama studi di fakultas Teologi, serta Ibu Budi dan Staf TU yang selalu memberikan informasi, dan bantuan kepada penulis terutama doa dan semangat yang diberikan. Tuhan memberkati
3. Papi dan mami dengan kasih sayang yang tulus selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan, memenuhi kebutuhan dan tak henti-hentinya selalu memberikan dukungan, arahan serta motivasi manakala penulis mengalami kesulitan dalam menjalani hidup. Doa dan harapan dari papi mami yang selalu menjadi semangat bagi penulis dalam menjalani hidup serta menyelesaikan studi S1 di UKSW. *Thankyou so much Dad n Mom, love you both!!*
4. Angkatan terbaikku, Teologi 2009, kalian sudah menjadi sahabat serta saudara selama kurang lebih 5 tahun ini. Kalian luar biasa!! Tetap semangat untuk kita semua, kita akan bertemu dalam sebuah kesuksesan. Tidak ada kata aku, tidak ada kata kamu, yang ada hanya kata kita. **2009InMyHeart!*
5. Sahabat-sahabat terkasih. Special thx Chika, Wina, Tika, Olke, Kiki, Nifie. Terima kasih untuk sharing, support, doa, canda tawa, galau dan anti-galau selama 5 tahun kita tinggal bersama. Thx buat monca, priska, angie meskipun kita berada ditempat yang berbeda tapi kalian selalu ada untuk penulis. *Miss u, guys!*

6. Teman-teman Pinaesaan terlebih khusus angkatan 09, terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama ini. Sukses untuk kalian semua guys! *Baku-baku sayang, baku-baku tolong, baku-baku jaga!!*
7. Terimakasih teman-teman pemuda/pemudi GMIM Betani SS, GMIM Kyrios Kawiley dan GMIM Imanuel Tandengan untuk doa dan semangat serta pengalamannya. Special thx utk teman pemuda “Marhanley Mukuan” yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penelitian yang dilakukan. Terimakasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Tuhan berkati ☺
8. Terimakasih untuk seseorang dalam kebersamaan kurang lebih 7 tahun. Perhatian, kasih sayang serta semua kenangan manis yang pernah mewarnai hari-hariku selama kuliah di UKSW. Terimakasih atas airmata, kecewa dan sakit hati yang boleh dihadirkan itu yang membuat penulis semakin kuat dan tegar dalam menjalani hidup. Maaf tidak dapat mewujudkan semua impian yang dulu pernah kita janjikan bersama. *Success for ur future n Love! miss you *CAYL*
9. Keluarga besar serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – satu, terimakasih untuk dukungan dan doa kepada penulis! Tuhan Yesus memberkati

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala saran dan nasihat dari pembaca. Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Teologi UKSW Salatiga.

Salatiga, September 2014

Penulis,

Indria Pricillia Tumbelaka

ABTRAKSI

Keterlibatan pendeta dalam dunia politik praktis sudah menjadi fenomena umum bagi warga jemaat GMIM khususnya yang ada di klasis kota manado. Keterlibatan pendeta dalam dunia politik praktis pastinya menimbulkan pro dan kontra di kalangan jemaat dimana pendeta itu melayani. Maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Persepsi jemaat GMIM terhadap pendeta yang terjun dalam dunia politik praktis. Dalam penelitian ini difokuskan pada persepsi jemaat GMIM dan dampak relasi antara jemaat dan pendeta yang terjun dalam dunia politik praktis. Ada beragam persepsi yang dikemukakan oleh para informan tetapi sebagian besar informan kontra dengan keterlibatan pendeta GMIM dalam dunia politik, dengan alasan tugas tanggung jawab sebagai hamba Tuhan tidak dilaksanakan dengan maksimal. Padahal tugas dan panggilan utama dari seorang pendeta adalah untuk memaksimalkan setiap pelayanan sesuai janji penahbisannya. Dampak relasinya juga beragam ada yang menjalin hubungan baik, ada juga yang tidak baik, semuanya itu dapat dilihat dari berbagai kinerja yang dilakukan pendetanya setelah berkiprah dalam dunia politik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyarankan sebaiknya Sinode GMIM mempunyai sikap yang jelas mengenai pendetanya yang bermaksud atau terlibat dalam politik praktis misalnya menjadi anggota legislatif. Sikap jelas yang saya maksud adalah agar ada keputusan dan kebijakan yang jelas bahwa mereka yang hendak dan terjun dalam dunia politik praktis harus mengundurkan diri dari jabatan kependetaannya. Hal ini untuk menghindari terjadinya perpecahan dalam jemaat karena pro dan kontra terhadap keterlibatan pendeta dalam dunia politik praktis.

PENDAHULUAN

1. A. Latar belakang

Gereja yang berlatar belakang Reformasi termasuk Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) secara fundamental telah memahami bahwa politik bukanlah bidang yang terlarang. Karena politik merupakan suatu bidang kehidupan dimana Gereja dapat memperjuangkan terwujudnya tanda-tanda kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus seperti keadilan, kebenaran, damai sejahtera dan sebagainya.¹ Gereja juga dipahami sebagai komunitas iman kepada Yesus Kristus atau bisa disebut juga komunitas iman politis.² Karena itu, kalau Gereja ingin mengabdikan kepada Allah dalam Yesus Kristus, maka Gereja juga harus bersifat politis. Tetapi memang harus ditegaskan bahwa kehadiran dan peran Gereja di bidang politik harus dibedakan secara prinsip, hakikat, sifat dan bentuk dari partai politik. Karena Gereja bukanlah partai politik dan tidak sama dengan partai politik.³ Gereja memiliki tugas panggilan yakni untuk memberikan bimbingan – bimbingan pastoral, turut dalam terselenggaranya suatu kehidupan politik yang benar, adil dan mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang,⁴ serta memberikan kritik-kritik yang profetis untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan berpolitik.

Perlu dipahami bahwa Gereja (baik sebagai umat atau lembaga/organisasi) pada hakekatnya hadir di dunia dengan mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan kabar baik, kabar keselamatan, kabar tentang damai bagi umat manusia. Gereja pun harus terbuka, dinamis, dialogis pada situasi perkembangan di masyarakat dengan sikap positif, kritis, kreatif dan realistis.⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat, Gereja harus bisa menyatakan tugas panggilannya tersebut dalam setiap aspek kehidupan masyarakat di antaranya dalam bidang politik. Kehadiran Gereja di dunia bukan hanya untuk melayani sekelompok orang tertentu tetapi juga masyarakat umum. Salah satunya melalui bidang politik di mana politik menjadi sangat penting sebab kehidupan jemaat dan masyarakat tidak

-
1. Sairin, Weinata- Patiassina, J.M. (Peny), Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1996
 2. Singgih, Emanuel Gerrit, Iman dan Politik Dalam Era Reformasi di Indonesia, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2004.
 3. Sibarani, Poltak.YP. 2004. Bolehkah Gereja Berpolitik (Mencari pola hubungan Gereja dan Negara yang relevan di Indonesia). Jakarta: Ramos Gospel Publishing House.
 4. Pokok-pokok tugas panggilan gereja
 5. Borrong, Robert P. 2006. Etika Politik Kristen, serba-serbi politik praktis. Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi STT Jakarta.

terlepas dari politik. Warga Gereja telah lama ikut serta dalam politik baik menjadi pengurus partai, pejabat publik maupun anggota legislative.⁶

Menjadi suatu hal yang baru ketika yang terlibat dalam politik adalah seorang Pendeta. Sejak bergantinya Orde Baru tahun 1998, Orde Reformasi telah memberikan kebebasan yang cukup signifikan bagi tumbuhnya partai-partai politik. Partai politik pun tumbuh bagai jamur di musim hujan dengan coraknya masing-masing. Euforia untuk berserikat dalam satu partai baik yang baru muncul maupun yang sudah ada juga melanda kehidupan para Pendeta untuk menjadi pengurus partai, entah partai Kristen maupun partai nasionalis terbuka. Para Pendeta pun ikut berpartisipasi dalam politik baik di partai politik maupun menjadi anggota legislatif dan eksekutif. Keterlibatan para Pendeta dalam politik praktis pun telah menimbulkan perdebatan dalam kehidupan warga Gereja sendiri. Sebagian warga Gereja setuju Pendeta terlibat politik karena memandang Pendeta sebagai pemimpin umat yang mempunyai wawasan yang luas terhadap berbagai aspek dan perkembangan dalam masyarakat termasuk politik dan selalu merelasikannya dengan panggilan Gereja yaitu menjadi garam dan terang dunia dan ikut serta dalam usaha mensejahterakan masyarakat. Pendeta dipandang memiliki potensi untuk menjadi seorang politisi yang ideal dalam tanggung jawab imannya kepada Tuhan dan tanggung jawab moral kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Perannya kemudian adalah menyuarakan dan memberlakukan kebenaran, keadilan dan kasih. Hal ini menjadi relevan dengan tujuan politik yang murni dalam negara yang seharusnya dilakukan oleh para politisi.

Dalam kurun waktu 3 periode dalam pemilihan anggota legislatif dikota Manado, sejak tahun 2004 – 2014 ada peningkatan kurang lebih 10% jumlah Pendeta GMIM yang terjun dan mencalonkan diri sebagai anggota legislative.⁷ Tentunya hal ini mengundang pro dan kontra bagi warga gereja khususnya jemaat yang pendetanya terlibat dalam politik. Salah satu pergumulan yang menjadi perdebatan adalah mengenai pemahaman tentang panggilan pendeta sebagai pelayan dipersoalkan kehadirannya atau keikutsertaannya dalam partai politik. Karena sebagai warga gereja, fungsi pendeta dipahami sebagai gembala dan hamba Tuhan yang melayani jemaat, dan fungsi pelayan atau pendeta yang diberikan Kristus yang naik ke surga adalah : mereka merupakan para hamba untuk melayani para pengikutnya, untuk

^{6.} R.M.S Gulton dan Mudiyo. Tanggung Jawab Warga Negara. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992

^{7.} Pendeta GMIM yang berpolitik 2009, Tabloid DODOKU edisi maret 2014

memperlengkapi orang-orang kudus Allah dalam pekerjaan pelayanan demi membangun tubuh Kristus.⁸ Pertimbangan lain yang kurang setuju adalah pandangan bahwa politik itu kotor, banyak seni berkompromi sehingga orang cenderung mencari rasa aman dan selamat. Oleh karena itu, profesi pendeta yang bertugas menjaga kekudusan dan kesucian hidup umat Tuhan sebaiknya menjauhkan diri dari kehidupan politik yang mengedepankan intrik-intrik licik dan penuh tipu muslihat dan tidak jarang pula mengabaikan moral dan etika. Profesi pendeta bukanlah jabatan yang diupayakan untuk memperoleh popularitas apalagi kekuasaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertantang untuk mengangkat persoalan Gereja dan politik yang melibatkan para pendeta yang terjun dalam dunia politik, serta ingin mengetahui bagaimana persepsi warga jemaat khususnya warga GMIM terhadap pendetanya yang terjun dalam dunia politik. Karena itu judul dari tugas akhir ini adalah: Gereja dan Politik: Studi kasus persepsi jemaat GMIM terhadap pendeta yang terjun dalam Politik Praktis.

1. B. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apa persepsi warga jemaat GMIM klasis kota manado terhadap Pendetanya yang terjun dalam dunia politik praktis untuk menjadi calon anggota legislatif ?
2. Bagaimana dampaknya terhadap relasi antara Pendeta yang terjun dalam dunia politik dengan warga jemaatnya ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis menyimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan persepsi warga jemaat GMIM klasis kota manado terhadap pendeta yang terjun dalam dunia politik praktis.
2. Mendeskripsikan dampak relasi antara Pendeta dengan warga jemaatnya.

1. C. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penulisan, maka Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara. Penelitian hanya dilakukan di klasis GMIM khususnya yang ada di kota Manado

⁸. Ronald, Leigh. 2002. Melayani dengan Efektif:34 prinsip pelayanan bagi pendeta. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia

dengan mewawancarai 10 orang informan/jemaat GMIM yang ada diklasis kota manado yang pendetanya terlibat atau pernah menjadi calon anggota legislative. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam terhadap informan kunci.

1. D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka penulis menganggap bahwa hasil penelitian ini dapat berguna sebagai berikut : Menyumbangkan pemahaman bagi masyarakat dan warga jemaat secara khusus fakultas Teologi tentang Pendeta yang berpolitik serta persepsi jemaat tentang permasalahan tersebut.

1. E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan penulis tuliskan dalam beberapa bagian yaitu : Bagian pertama berisikan Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian dua penulis akan mendeskripsikan teori-teori yang terkait dengan Gereja dan politik. Bagian tiga penulis akan memaparkan data hasil penelitian penulis terkait persepsi jemaat terhadap masalah yang penulis teliti serta dampak hubungan antara pendeta dan warga jemaat, dan menganalisis hasil data yang dikaitkan dengan teori dan rumusan masalah yang penulis teliti. Bagian keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang penulis lakukan.

2. Landasan Teori : Gereja dan Politik.

a. Pengertian Gereja

Istilah Gereja berasal dari bahasa portugis igreja dan melalui bahasa latin *ecclesia*, yang keduanya berasal dari bahasa Yunani ekklesia. Kata inilah yang kita jumpai dalam Perjanjian Baru; misalnya diterjemahkan dengan kata jemaat (dahulu diterjemahkan dengan kata “sidang” ataupun “sidang jemaat”); jemaat dari segala tempat dan segala abad, persekutuan segala orang percaya; sering juga disebut gereja yang tidak kelihatan (Mat 16:18); jemaat di suatu kota (Kis 5:11); jemaat yang berkumpul di sebuah rumah (Rm 16:5).⁹ Menurut *Eka Darmaputra* baik secara etimologis maupun semantik, Gereja adalah orang-orangnya. Sebagaimana dikatakan dengan tepatnya oleh *Martin Luther* bahwa Gereja adalah sebuah kongregasi, sebuah komunitas. Pendek kata Gereja adalah sebuah persekutuan di dalam Kristus.¹⁰

b. Pengertian Politik

Istilah politik berasal dari bahasa Yunani yakni polis yang berarti kota atau suatu Komunitas. Istilah lain dalam bahasa Yunani ialah politeia yang berarti warga. Jadi politik pada mulanya berarti suatu masyarakat yang berdiam di suatu kota.¹¹

Dalam mendefinisikan mengenai politik *Oscar Cullman*, yang dikutip oleh *Gunche Lugo*, membedakan antara politeia dan politeuma. Politeia berarti politik dalam arti merebut kekuasaan atau kedudukan dalam pemerintahan. Sedangkan politeuma adalah politik yang menekankan tegaknya nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini misalnya: keadilan, kebenaran, kesejahteraan dan mewujudkan peradaban baru yang mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai gamar dan rupa Allah (Kej. 1:26-28).¹²

Dalam teori politik modern, politik diasumsikan sebagai kekuasaan Negara, yang diwakili oleh partai politik untuk mewakili aspirasi masyarakat, khususnya dalam konteks Negara demokrasi. Dengan demikian dalam konteks Negara demokrasi, politik didefinisikan sebagai kekuasaan menduduki parlemen atau pemerintahan.

¹⁰. R. Soedarmo, kamus Istilah Teologi, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002, hlm. 30.

¹¹. Martin L. Sinaga (peny), Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia, Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputra, Jakarta: BPK Gunung Mulia, Hlm. 409.

¹². Gunche Lugo, Manifesto Politik Yesus, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009, hlm. 42

¹³. ibid

Dengan demikian politik identik dengan kekuasaan.¹³ Antara abad keenam belas sampai awal abad kedua puluh, politik diartikan lebih sempit dibandingkan dengan pengertian yang dipahami orang-orang Yunani. *Jean Bodin* (1530-1596), seorang filosof politik Prancis, memperkenalkan istilah “ilmu politik” (*science politique*). Definisi tentang politik, juga diungkapkan oleh *Montesquieu* (1687-1755), yang mengemukakan bahwa semua fungsi pemerintahan dapat dimasukkan ke dalam kategori legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹⁴

c. Pandangan Alkitab/Teologis Tentang Politik.

Setelah memahami Gereja serta pemahaman tentang politik, maka penulis akan memaparkan pandangan Alkitab tentang Politik. Istilah politik tidak dijumpai secara tersurat dalam Alkitab. Namun perlu disadari bahwa di dalam Alkitab tersirat bagian-bagian tentang bagaimana Umat Allah atau Gereja hadir di tengah-tengah masyarakat dan menata kehidupan bersama.

Dalam prinsip etika politik Alkitabiah, suatu pemerintahan yang baik memang terfokus dalam ketiga urusan ini: penegakan hukum yang tidak berat sebelah, keadilan bagi orang miskin, dan pembebasan warga dari penindasan dan kekerasan. Syair mazmur-mazmur yang terkait dengan peran kekuasaan berulang-ulang mengungkapkan pemerintahan ideal adalah yang menyahuti seruan orang berkekurangan, yang peduli orang miskin, dan yang menentang kekerasan melainkan mengupayakan damai. Di balik etika itu terdapat pengakuan bahwa para penguasa yang memihak pada pemulihan kaum yang lemah, miskin dan tertindas adalah “wakil” Allah. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam Perjanjian Lama yang menentukan sistem perpolitikan, khususnya di kalangan bangsa Israel dalam menata kehidupan bersama adalah ketaatan kepada Allah yang ditandai dengan berlakunya hukum Taurat dan keadilan.

Bagian lain yang penting dalam Perjanjian Baru, yang memiliki latar belakang pada suasana politik kerajaan Romawi adalah surat Wahyu yakni Wahyu 13. Dari sini ditekankan bahwa pemerintah yang memutlakkan dirinya dan menganggap dirinya mahakuasa, maka dia bagaikan binatang buas. Pemerintah yang demikian adalah seteru Allah dan bukan hamba Allah. Tema yang sama dikemukakan oleh Yesus pada saat

¹⁴. Gunche Lugo, op.cit, hlm. 42

¹⁵. Carlton Clymer Rodee dkk (ed), op.cit, hlm. 3

berada di hadapan Pilatus bahwa: “engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap Aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas” (Yoh 19:4). Demikian juga Petrus mengatakan bahwa “tunduklah, karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus-Nya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik” (I Petrus 2:13,14). Dengan demikian Pemerintah tidak memiliki kuasa mutlak, oleh karena itu harus dikritik dan dikoreksi jika tidak menjalankan tugasnya sebagai “hamba Allah”.

d. Hubungan Gereja dan Negara.

Hubungan antara Gereja dan Negara merupakan persoalan yang menjadi perdebatan dalam sejarah partisipasi Gereja dalam politik, bahkan menurut *Andreas A. Yewangoe* hubungan antara Gereja dan Negara bukanlah sesuatu yang gampang untuk dirumuskan. Sejarah sudah memperlihatkan kepada kita, bahwa, bukan tidak jarang perlombaan untuk saling mendominasi satu terhadap yang lainnya. Dalam kasus Gereja-Negara, Negara mendominasi Gereja, sehingga segala sesuatu yang berlaku di dalam Gereja ditentukan oleh Negara. Sejak Konstantin Agung (4M) menjadi Kristen, kecenderungan Negara untuk ikut menentukan apa yang baik dan tidak baik. Di Indonesia khususnya pada zaman kolonial, kita juga menghadapi kasus yang serupa. Pemerintah kolonial Belanda antara lain menempatkan apa yang disebutnya “*Commisarissen*” di dalam majelis-majelis Jemaat ‘*De Indische Kerk*’, yang pada waktu itu merupakan Gereja-Negara, yang berfungsi sebagai yang mewakili kepentingan-kepentingan Negara.¹⁵ Menurut *Donald Jay Losher*, secara umum pandangan mengenai hubungan antara Gereja dan Negara dibagi menjadi tiga kategori yaitu pemisahan ketat, asimilasi dan interaksi. Pemisahan ketat tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Negara, karena kaum kristen memilih sendiri untuk tidak berperan di bidang politik atau sosial. Asimilasi juga tidak mampu karena kaum beragama telah dikuasai oleh pemerintah dan ideologinya, sehingga hanya mampu menerima segala kebijakan secara pasif. Baik asimilasi maupun pemisahan ketat tidak mampu memegang peranan aktif dalam perubahan sosial dan politik. Sikap interaksilah yang mampu bertahan lama dalam periode kontemporer, karena transformasi dan

^{16.} Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina, Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996, Hlm. 23

pembebasan memegang peranan jauh lebih aktif dan positif, meskipun juga dengan resiko yang lebih besar namun memegang peranan paling aktif, kritikal dan positif terhadap Negara dan masyarakat.¹⁶

Zakaria J. Ngelow yang membaginya ke dalam 5 model yakni: kesatuan Gereja dengan Negara, yang memberi Gereja kuasa atas Negara. Yang disebut *ecclesiocracy*; kesatuan Gereja dengan *National confessionalism* Negara, yang memberi Negara kuasa atas Gereja. Yang disebut *erastianism*; suatu kesatuan denominasi gereja tertentu dengan Negara. Yang disebut sebagai *The Establishment Principle*; suatu pengakuan resmi atas otoritas pemerintahan Yesus Kristus dan Firman-Nya oleh Negara.¹⁷ Menurut Calvin sebagaimana yang dikutip oleh Andreas A. Yewangoe, mengenai hal tersebut bahwa hubungan Gereja dengan Negara merupakan dua lingkaran yang pusatnya adalah Yesus Kristus. Jadi baik negara maupun gereja berpusatkan satu pusat saja yaitu Yesus Kristus. Dengan kata-kata lain, baik pelayanan gereja maupun pelayanan negara bersumber dari sumber yang satu yaitu Yesus Kristus. Hanya memang lingkup pelayanan mereka berbeda. Yang satu mungkin lebih terbatas, sedangkan yang lainnya lebih "luas". Marthin Luther pada pihak lain berbicara mengenai dua kerajaan yang terpisah, namun terdapat juga titik-titik singgung di antara keduanya. Bagaimana menempatkan secara persis titik-titik singgung itu, tentu dibutuhkan pemahaman mendalam dan kepekaan luar biasa menyiasati apa yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁸

e. Tujuan Keterlibatan Gereja dalam Politik.

Tujuan pelayanan : Politik penuh dengan kecenderungan destruktif atau bersifat merusak yang kemudian melahirkan penindasan dan belenggu bagi banyak orang. Oleh sebab itu gereja terpanggil untuk ikut serta dalam usaha pelayanan atau pembebasan yang dilakukan Allah (Luk. 4; Mat. 25). Gereja perlu melayani mereka yang menjadi korban permainan politik, gereja harus mewujudkan kebebasan dan hak-

¹⁷. Ibid, hlm 105

¹⁸. Zakaria J. Ngelow, Pengalaman Kristen dalam hubungan agama dan Negara, Pointers pada seminar Gereja, Negara dan Isu-Isu Agama, download, 15 Juli 2014.

¹⁹. Andreas A. Yewangoe, Agama dan Negara: Sebuah Hubungan Yang Tidak mudah, Disampaikan Dalam Kursus "Pendidikan Politik Angkatan III" di Palangka Raya, 20 Oktober 2008.

hak asasi manusia dalam segala lapangan kehidupan: agama, pendidikan, pekerjaan dan lain – lain.¹⁹

Tujuan Missioner : Gereja perlu berbicara dan bersaksi tentang kebaikan Allah bagi semua manusia.²⁰

Tujuan Korektif : Melakukan koreksi terhadap dosa para pemimpin politik. Koreksi dapat diartikan sebagai pelayanan pastoral. Gereja harus menimbulkan kesadaran akan kasih Allah bagi mereka yang ingin berubah dan menyesali kesalahannya.²¹

Tujuan Normative : Gereja harus menegakkan kebenaran di tengah kehidupan politik, yaitu menegakkan keadilan dan mewujudkan kasih. Maka kekuasaan politik harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan cinta kasih dengan kata lain, tujuan keterlibatan gereja dalam politik agar manusia lebih taat kepada Allah, dari pada manusia.²²

Tujuan Edukatif : Gereja harus mendidik warga gereja supaya peduli dan paham mengenai tugas panggilannya di dunia. Ketertibatan dalam politik sekaligus berfungsi sebagai pendidik politik bagi warga gereja.²³

f. Model Keterlibatan Gereja dalam Politik di Indonesia

Setelah memahami hubungan antara Gereja dengan Negara, baik dalam konteks yang lebih luas, maupun dalam konteks Indonesia, maka selanjutnya penulis akan memaparkan tentang Strategi atau model peran politik Gereja di Indonesia.

Model Yusuf – Daniel

Yang dimaksudkan dengan Model Yusuf-Daniel adalah peran politik warga Gereja di Indonesia, yang berusaha untuk masuk dalam “lingkaran kekuasaan”. Hal ini nampak dari pendirian partai Kristen dan ketelibatan dalam partai non Kristen, yang telah mengantar beberapa tokoh-tokoh Gereja menduduki jabatan yang strategis dalam pemerintahan mulai dari zaman pergerakan nasional sampai pada era reformasi. Tokoh Yusuf diceriterakan dalam kejadian 37:1-50:26, Ia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir dan di sana ia memperlihatkan prestasi yang cukup gemilang, ia dapat

20. Robert P. Borong, *Etika Politik Kristen serba-serbi Politik Praktis* (Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi dan Pusat Studi Etika), hal. 5.

21. Ibid, hlm 6

22. Ibid,

23. Ibid,

24. Ibid,

mengalahkan godaan dari istri Potifar, berhasil menafsirkan mimpi para tahanan dan mimpi Firaun dan juga memberi nasihat praktis yang segera diterima oleh Firaun. Prestasi inilah yang mengantarkan Yusuf sebagai penguasa atas istana, sehingga ia bertanggung jawab atas keuangan Mesir dan walaupun Yusuf telah menjadi petinggi di Mesir, dia tidak pernah mendendam terhadap saudara-saudaranya bahkan tergerak hatinya untuk membantu mereka.²⁴ Demikian pun yang dialami oleh Daniel, Ia adalah salah seorang pengawas dari seratus dua puluh provinsi kerajaan. Walaupun dia berada dalam lingkaran kekuasaan, ia tetap mempunyai integritas hal ini terbukti ketika ada surat keputusan dari raja bahwa barang siapa selama tiga puluh hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi Daniel tetap menjalankan kebiasaannya yakni berdoa kepada Allah, yang membuat dia dihukum, tetapi Ia tetap diselamatkan oleh Allah yang disembahnya (Daniel 6:2-29).²⁵

Peran politik model Yusuf –Daniel, juga nampak dalam terlibatnya pendeta dalam lingkaran politik praktis. Menurut Zakaria J. Ngelow, Baik pada masa PARKINDO maupun di era Reformasi pendeta-pendeta terlibat langsung dalam dunia politik praktis. Apakah pendeta cocok menjalankan peran partisipasi politik Kristen? Ya dan tidak. Ya, karena pendeta adalah pemimpin umat yang (seharusnya) mempunyai wawasan yang luas terhadap berbagai aspek dan perkembangan dalam masyarakat, termasuk politik, dan selalu merelaksikannya dengan panggilan gereja. Tidak, karena pendeta yang terlibat dalam politik praktis memilih salah satu partai/golongan politik, dan dengan itu tidak bisa lagi membina warga jemaatnya dalam aktivitas politik yang berbeda-beda. Masalah pendeta dalam dunia politik praktis bukan terutama masalah doktrin jabatan menyangkut salah atau benar; melainkan masalah etika, boleh atau tidak boleh. Pendeta yang berpolitik akan cenderung mengarahkan warga jemaat pada kepentingan partainya, dan dengan demikian tidak netral. Bahkan dapat memakai mimbar gereja untuk kampanye politik, bukan pemberitaan Injil. Yang juga penting adalah motivasi pendeta terjun dalam politik praktis. Ada pendeta yang memang bekerja dalam dunia politik dengan integritas, visi dan komitmen. Tetapi banyak pula yang sesungguhnya ikut Yunus

²⁵. Dianne Bergant dan Robert J. Karris (ed), Tafsir Alkitab Perjanjian Lama, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm. 74

²⁶. Ibid, hlm 620

“melarikan diri” ke Tarsis. Dalam artian tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan sesuai janji iman yang pernah diucapkan.

Model Musa – Elia

Yang dimaksud dengan Model Musa-Elia adalah peran politik Gereja yang kembangkan ke arah tepian sosial: solidaritas dengan kaum marginal. Model ini berbeda dengan Model Yusuf-Daniel yang berorientasi ke lingkaran elit kekuasaan.

Dalam Keluaran 2:1-22, diceritakan tentang Musa yang dibesarkan dalam lingkungan istana di Mesir, namun karena rasa solidaritasnya terhadap bangsanya ia melarikan diri dari istana menuju ke Midian dan dari situlah Musa mendapat pengutusan dari Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian (Kel. 3:7-15). Solidaritas itu pun yang diperlihatkan oleh Elia di tengah pemerintahan raja Ahab di Israel yang tidak memihak kepada rakyat kecil dan ketika kekeringan melanda negeri itu. Solidaritas itu digambarkan melalui cerita mengenai seorang janda di Sarfat, di mana Elia melakukan mujizat yakni minyak dan tepung menjadi banyak dan membangkikannya anak tunggal dari janda itu (I Raja-raja 17:1-24).

Partisipasi transformatif itu merujuk pada Gereja Purba sebagai model dan ukurannya: Jemaat Kristen purba merupakan model dan ukuran bagi peran Gereja di tengah-tengah masyarakat, yaitu bukan dengan suatu ideologi atau sistem sosial politik tertentu, melainkan dengan hidup dari dan di bawah kekuasaan Kristus mewujudkan kasih dan keadilan. Cara hidup gereja Kristen yang lama dalam masyarakat selama abad-abad yang pertama bukan konservatif, maupun evolusioner, atau revolusioner, melainkan membetulkan (mentransformasikan) dan karena itu mengubah. Gereja, yakni jemaat-jemaat, hanya dapat melancarkan pengaruh-pengaruh yang dinamis, yang membarui dan mengubah itu dalam masyarakat jika gereja sadar akan masalah-masalah yang dihadapi dan jika gereja hidup dari penggenapan dan pengharapan akan Kerajaan Allah yang dalam Yesus Kristus telah dan akan datang itu. Menurut Julianus Mojau dalam konteks Indonesia yang majemuk, peran politis yang cukup prospektif adalah Gereja menjadi Komunitas iman basis yang memberdayakan warga Jemaat dan masyarakat sehingga memiliki kesadaran politik kritis terhadap segala bentuk kekuasaan hegemonis yang selalu ingin mengkorup harkat dan martabat mereka.²⁶

27. Zakaria J. Ngelow, Partisipasi Umat Kristen Indonesia di Bidang Politik, Jurnal STT Intim Makassar, Edisi No. 5 – 2003, hlm. 48.

Model Yesus

Yang dimaksud dengan Model Yesus adalah peran politik Gereja yang bukan hanya berorientasi pada proses pemberdayaan warga masyarakat saja (model Musa-Elia), tetapi juga berkaitan erat dengan peran profetis atau dengan kata lain disamping memberi pendidikan politik dan pendampingan pastoral terhadap warganya, Gereja juga tetap mengkritik pemerintah jika cenderung tidak memihak kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa aspek dari kehidupan yang menonjol dalam pengajaran dan kehidupan Yesus Kristus yakni hubungan dan perhatian-Nya terhadap rakyat jelata atau miskin dan termarginalkan. Jika kita menelusuri latar belakang kehidupan Yesus maka Dia sebenarnya berasal dari kalangan rakyat kecil dan melakukan pemberitaan dan pelayanannya terutama di wilayah pedalaman Galilea di antara rakyat kecil. Laporan Injil-injil mengenai pekerjaan dan pengajaran Yesus memperlihatkan perhatian terhadap dan keakrabannya dengan dunia orang kebanyakan. Ia berbelas kasihan terhadap orang banyak (Mat. 9:36). Orang-orang yang dilayani Yesus secara langsung adalah rakyat miskin dan mereka yang dikucilkan dari masyarakat. Penyembuhan-penyembuhan-Nya adalah atas rakyat kecil yang sakit seperti orang buta dan orang timpang. Ia memberi makan kepada orang banyak, yaitu rakyat yang datang berkumpul mendengar pengajarannya tanpa bekal yang cukup. Pengajaran Yesus Kristus sendiri memihak kaum jelata. Sabda bahagia dalam khotbah di bukit (Luk. 6:20-21) tertuju kepada mereka: “Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya Kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa (Luk. 6:20-21; Mat. 5:1-2)

Pengajaran Yesus Kristus bertolak dari pemahaman akan misinya selaku Mesias pembawa kabar sukacita bagi kaum miskin dan menderita. Dalam khotbah-Nya di Nazaret, Yesus merujuk kepada nubuatan nabi Yesaya (Yes. 61:1-2):

“Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab ia mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang” (Luk. 4:18-19).

Nats ini merupakan konsepsi mengenai Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Mesias dikaruniakan dan diperlengkapi Tuhan dengan kemampuan untuk mengatasi krisis yang melanda masyarakat, tugas mesias adalah menegakkan keadilan bagi rakyat yang tertindas, dan memulihkan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat, serta membawa umat pada pertobatan, mesias bekerja tidak terutama dengan mengandalkan kekuatan kekuasaan, melainkan dengan kerelaan untuk menderita.²⁷



^{28.} Zakaria J. Ngelow, Gereja dan Masyarakat Madani di Indonesia, Jurnal Teologi Persetia, 1999, Hlm. 32-33

3. Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Selayang Pandang

GMIM berdiri pada tanggal 30 September 1934. GMIM merupakan sebuah gereja yang diwarisi dari Zending Belanda yang menganut ajaran Calvinisme, dimana kepengurusan Sinode ditunjuk oleh Pemerintah Belanda dan berasal dari orang Belanda. Baru pada masa penjajahan Jepang kepengurusan GMIM berada ditangan orang Minahasa. Sekarang GMIM berkembang dengan pesat dan merupakan gereja Kristen terbesar ketiga di Indonesia. Anggota GMIM sekarang berjumlah ratusan ribu orang bahkan lebih terbagi dalam 998 jemaat, dan 99 wilayah pelayanan. Struktur kepemimpinan dalam GMIM bersifat Presbyterial Sinodal, yaitu yang menjadi pimpinan gereja bukan hanya pendeta tetapi juga dari para anggotanya, namun anggota-anggota itu dipilih sebagai pelayan khusus seperti pendeta, penatua, syamas (diaken) dan guru agama. Keputusan ditetapkan bersama melalui musyawarah. Ada tiga tingkatan kepengurusan GMIM yaitu Jemaat, Wilayah dan Sinode.²⁸

3a. Persepsi Warga Jemaat GMIM (Kota Manado) terhadap pendetanya yang terjun dalam politik praktis.

Berdasarkan kerangka teori tentang Gereja dan Politik yang telah dipaparkan sebelumnya, memberikan gambaran bahwa pemahaman tentang peran politik Gereja GMIM telah mengalami penyempitan makna. Hal ini terbukti dalam keterlibatan para pendeta-pendeta GMIM yang terlibat dalam politik praktis, yang seharusnya menurut Penulis sendiri, gereja GMIM harus memainkan peran politik etis atau politik pemberdayaan, agar peran warga jemaat dalam rana politik praktis dapat memperlihatkan bahwa mereka mengemban misi Gereja untuk mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang sesuai misi dari gereja reformator termasuk GMIM. Akan tetapi sepuluh tahun terakhir ini, GMIM bersoal dengan konflik internal yang tidak

²⁹. Sejarah Gereja Masehi Injili di Minahasa

bisa lagi disebut sebagai rahasia karena hal tersebut sudah mengemuka di ruang public salah satu dari persoalan yang dialami oleh GMIM yaitu hubungan antara GMIM dengan Politik yang semakin relatif. Persoalan ini tentu memiliki sejarah yang panjang, dan rumit adanya. Tapi setidaknya, masuknya sejumlah politisi dalam BPMS GMIM yang sudah dari beberapa tahun terjadi, menegaskan bahwa ketidakjelasan hubungan antara GMIM dengan kekuasaan politik bukanlah isapan jempol belaka. GMIM telah dijadikan sebagai batu loncatan sejumlah politisi untuk meraih kekuasaan di lembaga legislatif dan eksekutif adalah bukti tidak konsistennya GMIM menjaga hubungannya dengan politik/kekuasaan . GMIM sebenarnya, dari awal berdirinya telah merumuskan dalam Tata Gerejanya tentang posisi gereja dalam politik. Bahwa gereja berpengapa dengan politik, tetapi dia tidak ikut dalam politik praktis. Inilah sikap yang harus selalu dipegang oleh pemimpin-pemimpin GMIM. Tetapi dalam sejarah GMIM, kelihatan bahwa ada sejumlah pendeta, yang masuk terang-terangan dalam politik praktis. Kemudian juga ada pendeta-pendeta yang lain. Mereka-mereka itu sambil beraktivitas di politik praktis, juga terus menduduki jabatannya di gereja sebagai pendeta.

Menurut teori yang penulis dapatkan. Dalam mendefenisikan mengenai politik Oscar Cullman, yang dikutip oleh Gunche Lugo, membedakan antara politeia dan politeuma. Politeia berarti politik dalam arti merebut kekuasaan atau kedudukan dalam pemerintahan. Sedangkan politeuma adalah politik yang menekankan tegaknya nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini misalnya: keadilan, kebenaran, kesejahteraan dan mewujudkan peradaban baru yang mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai gamar dan rupa Allah (Kej. 1:26-28)

Adapun menurut pandangan dari beberapa informan, Gereja dan politik itu saling berhubungan, seperti yang dikemukakan oleh Bpk. Fentje Bawengan, salah seorang warga GMIM, Melalui wawancara beberapa waktu yang lalu mengatakan “Gereja itu berhubungan dengan politik, karena dalam satu persekutuan Gereja juga mengajarkan orang atau jemaat berpolitik. Hanya saja politik yang diajarkan Gereja berdasarkan pada ajaran Yesus Kristus dengan jalan kebenarannya”. Ada juga yang beranggapan bahwa gereja itu tidak berkaitan dengan politik. Seperti yang di kemukakan oleh Ibu. Foune Tendean, salah seorang warga jemaat GMIM “KALVARI” Malalayang, dia mengatakan “gereja tidak ada hubungan / keterkaitan

dengan politik. Gereja maupun politik sudah Berada pada kriteria dan posisi masing – masing. Sama sekali tidak dapat dihubungkan.”

Tentang pandangan dari jemaat terhadap pendeta yang berkiprah dalam politik mempunyai beberapa macam persepsi dari masing – masing informan yang telah diwawancarai. Contohnya, menurut informan Bpk. Nico Senewe dari jemaat GMIM “Betlehem” Mokupa mengatakan “lebih baik meninggalkan jabatan sebagai seorang Pendeta, lalu berkiprah dalam politik. Karena Hamba Tuhan tidak boleh berpolitik”. Ada juga anggapan bahwa “Boleh saja seorang pendeta bertkiprah dalam politik asalkan pendeta itu bisa menghadirkan suara – suara kenabian / menyuarakan hal – hal yang baik dan benar di dalamnya dan tidak meninggalkan tugasnya yang utama, yaitu melayani Tuhan dan sesama” yang telah di kemukakan oleh Bpk.Hendro winerungan salah seorang warga GMIM Jemaat “Bethesda” Mokupa.

Ada jemaat yang kontra atau tidak mendukung jika seorang pendeta terlibat dalam dunia politik seperti menurut Ibu. Olivia Komimbing mengatakan dalam wawancara waktu yang lalu “Saya kontra, karena jika pendeta itu sudah berkiprah dalam politik pastinya dia akan mengabaikan Tugasnya sebagai seorang Pelayan Tuhan”. Tetapi ada juga yang Pro atau setuju dengan pendeta yang berkiprah dalam politik seperti yang dikemukakan oleh Bpk. Arjen Karisoh dari Jemaat GMIM “Sion” Malalayang “Saya mendukung, asalkan sang pendeta hidup benar dimata Tuhan, menjalankan politik dengan takut akan Tuhan, itu akan menjadi terobosan baru dalam dunia penginjilan”.

Dari hasil wawancara banyak yang beranggapan bahwa tidak ada manfaat dan keuntungan yang akan diberikan oleh seorang pendeta jika dia terlibat dalam dunia politik, seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Olivia Komimbing dari Jemaat GMIM “Alfa Omega” Kumaraka Dalam, Bpk. Arjen Karisoh dari Jemaat GMIM “Sion” Malalayang dan Ibu Deivie Rumbajan GMIM “MARANATHA”.

Namun ada juga yang beranggapan bahwa Pendeta itu bisa membawa manfaat dan keuntungan jika dia berkiprah dalam politik seperti yang dikatakan oleh Bpk. Ventje Lempoy Jemaat GMIM “Imanuel” Bahu “Banyak pengalaman bermasyarakat yang dapat diterapkannya kepada jemaat, dan bisa mendatangkan banyak keuntungan apabila dia sukses dalam berpolitik”, dan juga pernyataan dari Bpk.Hendro

winerungan Jemaat GMIM “Bethesda” Mokupa yang mengatajkan bahwa “Manfaat / keuntungan yang bisa diberikan pendeta kepada gerejanya adalah akan terjadinya perubahan yang baik kepada gereja (jemaat) dimana nilai – nilai / hal – hal yang baik bisa diterapkan dalam kehidupan jemaat. Contoh : Kejujuran, keadilan, rendah hati, tidak memihak”

3b. Dampak Relasi antara warga dan pendetanya yang terlibat politik praktis.

Dari hasil penelitian semua beranggapan bahwa hubungan relasi antara pendeta dan jemaatnya harus dibangun dan di jaga seperti yang dikatakan oleh Ibu Deivie Rumbajan warga Jemaat GMIM “MARANATHA” Teling, bahwa “Pendeta dan jemaat harus mempunyai relasi yang baik dalam pelayanan maupun dalam bermasyarakat”. Penulis setuju dengan pendapat Ibu deivie, tetapi tidak sedikit juga para informan mengatakan bahwa mereka menghormati dan menghargai pendeta mereka, meskipun apa yang dilakukan sudah menyimpang dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan. Sejauh ini penulis mengamati akan relasi yang ada antara jemaat dan pendetanya, serasa ada perbatasan antara pendeta dengan jemaat karena setelah diteliti ada banyak persepsi yang kontra akan tetapi jemaat tidak melakukan apa – apa hubungan keduanya terlihat baik – baik saja. Tentunya hal ini hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain jika dibiarkan terus menerus.

Tetapi ada juga hubungan relasi antara pendeta dan jemaat tetap terjaga tidak akan ada jarak untuk jemaat dan pendeta berkomunikasi dan saling sharing demi kemajuan pelayanan dalam gereja maupun dalam bermasyarakat.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan dan aktivitas Pendeta ialah sikap dan perilaku etis yang ditunjukkan atau dijalankan. Sikap dan perilaku etis itu pada umumnya juga dijadikan acuan dan kriteria penilaian jemaat terhadap Pendetanya. Adapun yang dimaksud dengan perilaku etis Pendeta disini ialah kesadaran dan sikap rohani-keimanan yang mendasari dan memedomani seluruh perilaku Pendeta, sesuai dengan pemahaman dan penghayatan akan jabatan dan tugas-tugas Pendeta sebagai panggilan yang diterima dari Kristus.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Bpk. Paul Sangian dari Jemaat GMIM “PETRA” Kairagi dalam wawancara penelitian saya beberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwa “Selama pendeta itu tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan Tuhan, tidak akan ada masalah soal hubungannya dengan jemaat”.

Fungsi dan peran seorang iman dalam Kristen adalah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pelaksanaan ritual dalam gereja, penjaga tradisi – tradisi Kristen, supaya tetap murni. Dalam perjanjian lama aturan-aturan yang ada disampaikan langsung oleh Allah melalui nabi-nabi. Pada gereja modern fungsi imam ini dilaksanakan oleh sinode pusat yang membawahi langsung gereja – gereja yang ada. Aturan yang dibuatpun berdasarkan kebutuhan umat dan tidak menyalahi aturan – aturan yang sudah ada dalam alkitab serta telah berlaku umum pada gereja – gereja yang dibawahinya. Dalam paparan teori tentang hubungan gereja dan negara, kata partisipasi bisa bermakna positif bisa juga bermakna negative. Positif karena menunjukkan keikutsertaan, keterlibatan, atau peran gereja dalam dinamika perkembangan kehidupan nasional. Fungsi dan peran seorang imam dalam Kristen adalah sebagai pemimpin yang bertanggungjawab penuh terhadap seluruh pelaksanaan ritual dalam gereja, penjaga tradisi-tradisi Kristen supaya tetap murni. Dalam Perjanjian Lama, aturan-aturan yang ada disampaikan langsung oleh Allah melalui nabi-nabi. Pada gereja modern, fungsi imam ini dilaksanakan oleh sinode pusat yang membawahi langsung gereja-gereja yang ada. Aturan yang dibuat pun berdasarkan kebutuhan umat dan tidak menyalahi aturanaturan yang sudah ada dalam Alkitab serta berlaku umum pada gereja-gereja yang dibawahinya. Fungsi ini sejalan dengan fungsi legislasi lembaga legislatif yang bertugas untuk menentukan policy dan membuat undang-undang serta mempunyai hak inisiatif, hak mengamandemen rancangan undang-undang eksekutif dan hak budget. Sebelum membuat undangundang, legislatif haruslah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan kepekaan dalam membaca situasi dan kondisi masyarakat sehingga undang-undang yang dihasilkan pun tepat sasaran. Ada berbagai macam pendapat dari informan yang diwawancarai mengenai “Dampak Relasi Akibat Keterlibatan Pendeta Dalam Dunia Politik Praktis Telah Mengalami Perubahan”. Seperti Bpk. Freddy Lumintang dari Jemaat GMIM “SYALOOM” Karombasan yang mengatakan “Hubungan dengan jemaatnya menjadi terbatas”, Ibu Foune Tendea dari Jemaat GMIM “KALVARI” Malalayang mengatakan “Pelayanan pendeta menjadi tidak optimal karena sudah terganggu akibat keterlibatannya di dunia politik”, dan ada juga pendapat dari Bpk.Hendro winerungan dari Jemaat GMIM “Bethesda” Mokupa yang mengatakan bahwa “Pelayanannya akan menjadi tidak efektif.

4. Penutup.

Dari deskripsi hasil penelitian dan analisisnya di atas maka pada bahagian ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan mengusulkan beberapa saran.

a. Kesimpulan:

Pertama, ternyata persepsi warga terhadap pendetanya yang terlibat dalam politik praktis sangat beragam. Ada yang mendukung dengan alasan bahwa orang Kristen perlu juga terjun dalam dunia politik untuk membawa kebenaran dan keadilan bagi masyarakat, asal saja pendeta tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan jemaat. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa gereja perlu melayani dalam semua bidang termasuk bidang politik. Tetapi saya berkesimpulan bahwa pandangan ini kurang berdasar pada tata aturan GMIM khususnya dalam tugas panggilan pendeta, karena gereja berpartisipasi dalam dunia politik tak perlu terjun langsung dalam politik praktis misalnya pendeta menjadi anggota legislative. Sudah pasti bahwa pelayanan pendeta akan terbengkalai karena keterbatasan waktu.

Kedua, Sebagai besar informan kunci berpendapat bahwa pendeta yang terjun dalam dunia politik praktis tidaklah bertanggungjawab dengan panggilannya sebagaimana diucapkan dalam penahbisannya. Karena penahbisannya berimplikasi pada tugas khusus melayani umat dan dunia dengan cara yang khusus pula. Oleh karena itu bagi mereka keterlibatan dalam dunia praktis sebagai anggota legislative adalah suatu penyangkalan terhadap panggilannya dan bertentangan dengan janji penahbisannya. Memang mereka tak keberatan walaupun ada pendeta yang tertarik ke dunia politik praktis, namun mereka harus meninggalkan jabatan kependetaannya.

b. Dampak terhadap relasi antara antara warga jemaat dengan pendetanya yang

Terjun dalam dunia politik praktis jelas ada. Sebahagian kecil informan kunci mengatakan bahwa hubungan antara anggota jemaat dan pendetanya tidak masalah, karena mereka dapat memahami. Namun pandangan seperti ini tentulah sangat subyektif. Sebaagian besar informan kunci mengatakan bahwa ada dampak dalam relasi keduanya. Warga merasa tidak senang, terutama karena kinerja pendetanya dalam pelayan menjadi menurun, kurang memberi perhatian terhadap tugas pokok pelayanannya. Hal yang lebih parah lagi ialah, bahwa pendeta yang terjun dalam dunia politik praktis seperti calon legislative tentulah melalui suatu partai politik tertentu, sedangkan warga jemaatnya memilih menjadi simpatisan terhadap partai politik lain yang berbeda dengan pendetanya. Maka pastilah ada ketidaksenangan dari

warga terhadap pendetanya yang menjadi anggota partai yang berbeda, dan warga jemaat tak rela bilamana ia diarahkan ke parati politik tertentu yang sama dengan pendetannya. Mereka juga tegas menghendaki agar pendeta yang terjun dalam dunia politik praktis mengundurkan diri dari jabatan kependetaannya.

a. Saran-saran

Pertama, sebaiknya Sinode GMIM mempunyai sikap yang jelas mengenai pendetanya yang bermaksud atau terlibat dalam politik praktis misalnya menjadi anggota legislatif. Sikap jelas yang penulis maksud adalah agar ada keputusan dan kebijakan yang jelas bahwa mereka yang hendak dan terjun dalam dunia politik praktis harus mengundurkan diri dari jabatan kependetaannya. Hal ini untuk menginhadari terjadinya perpecahan dalam jemaat karena pro dan kontra terhadap keterlibatan pendeta dalam dunia politik praktis.

Kedua, perlu pembinaan yang terus menerus baik terhadap pendeta dan warga jemaat tentang bagaimana berpartisipasi dalam dunia politik secara Kristiani dan bertanggungjawab, sehingga dunia politik dihindarkan dari berbagai politik uang dan lain-lain praktik yang tidak etis.

DAFTAR PUSTAKA

a. Alkitab, Kamus

Alkitab, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia

Soedarmo, kamus Istilah Teologi, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002,

b. Buku

Artanto, Widi, Menjadi Gereja Misioner Dalam Konteks Indonesia, Yogyakarta, Kanisius, 1997

Bergant, Dianne dan Robert J. Karris (ed), Tafsir Alkitab Perjanjian Lama, Yogyakarta: Kanisius, 2002

Boland, B.J. & Niftrik, G.C., Dogmatika Masa Kini, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2001

Budi Kleden, Paulus, Teologi Terlibat; Politik dan Budaya dalam Terang Teologi, penerbit Ledalero, 2003

Clymer Rodee, Carlton dkk (ed), Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001

De Gruchy, John W., Agama Kristen dan Demokrasi: Suatu Teologi bagi tata dunia yang adil, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2003

Ceunfin, Frans (Ed), Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik, Penerbit Ledalero, 2004

Lugo Gunche, Manifesto Politik Yesus, Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2009

Madung, Otto Gusti, Politik antara Legalitas dan Moralitas, Maumere: Penerbit Ledalero, 2009

Mojau, Julianus, Teologi Politik Pemberdayaan, Yogyakarta, Kanisius, 2009.

Saidi, Anas (Ed), Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru, Jakarta, Penerbit Desantara, 2004.

Sairin, Weinata- Patiassina, J.M. (Peny), Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1996.

Sairin, Weinata, Iman Kristen dan Pergumulan Kekinian, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1996

Kerukunan Umat Beragama Pilar utama Kerukunan Bangsa, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2006.

Sulastomo, Reformasi Antara Harapan dan Realita, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003

Purnomo, Aloys Budi. Membangun Teologi Inklusif-Pluralistik. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003

Theissen, Gerd, Gerakan Yesus, Maumere, Penerbit Ledalero, 2005.

Tim Balitbang PGI, Meretas Jalan Teologi Agama-agama di Indonesia: Theologia Religionum, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004

Robert P. Borong, Etika Politik Kristen serba-serbi Politik Praktis (Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi dan Pusat Studi Etika), hal. 5.

Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia, Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputra, Jakarta: BPK Gunung Mulia

Singgih, Emanuel Gerrit, Iman dan Politik Dalam Era Reformasi di Indonesia, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2004.

c. Jurnal

Ngelow, Zakaria J., Refleksi Teologis Sub-Tema Sidang MPL PGI, Clarion Hotel, Makassar,

Pendeta Berpolitik?, www.oaseonline.org, download, 15 juli 2014

Pengalaman Kristen dalam hubungan agama dan Negara, Pointers pada seminar Gereja, Negara

Gereja dan Masyarakat Madani di Indonesia, Jurnal Teologi Persetia, 1999, Hlm. 32-33

Sinaga, Martin Lukito. Jalan Baru Politik di Indonesia, [http:// www. suara pembaruan. Com / News / 2004 / 04 / 03/ index.html](http://www.suara-pembaruan.com/News/2004/04/03/index.html), Download, 15 Juli, 2014

Yewangoe, Andreas A., Agama dan Negara: Sebuah Hubungan Yang Tidak mudah, Disampaikan Dalam Kursus “Pendidikan Politik Angkatan III” di Palangka Raya, 20 Oktober 2008.